

**IMPLEMENTASI KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010  
DI MASYARAKAT ADAT SENTANI PAPUA**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Magister Kenotariatan



**OLEH**

**PUTRI PARAMITA**

**NIM: S.351402028**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2016**

**IMPLEMENTASI KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010  
DI MASYARAKAT ADAT SENTANI PAPUA**

**DISUSUN OLEH :**

**PUTRI PARAMITA  
NIM : S351402028**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing

Nama

Tanda Tangan

Tanggal


**Dr. Mohammad Jamin, SH. M.Hum  
NIP. 19610930 198601 1 001**



**17/2/16**

Mengetahui :

Kepala Program Studi Magister Kenotariatan





**Burhanudin Harahap, SH., MH., M.Si., Ph.D  
NIP : 196007161985031004**

**IMPLEMENTASI KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010  
DI MASYARAKAT ADAT SENTANI PAPUA**

DISUSUN OLEH :



**PUTRI PARAMITA  
NIM : S351402028**

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tandatangan	Tanggal
Ketua	<u>Burhanuddin Harahap, S.H., M.H.M., Si, Ph.D.</u> NIP. 196007161985031004		
Sekretaris	<u>Dr. Mohammad Jamin, SH., M.Hum</u> NIP. 196109301986011001		16/2/16
Penguji Pembanding Internal	<u>Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum</u> NIP. 196412012005011001		16/2-2016
Penguji Pembanding Eksternal	Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn		16/2 2016


Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, MPd  
NIP. 196007271987021001

Kepala Program Magister Kenotariatan



Burhanudin H., SH., MH., MSI., Ph.D.  
NIP. 196007161985031004

## **PERNYATAAN**

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa :

**NAMA : PUTRI PARAMITA**

**NIM : S. 351402028**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“Implementasi Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Masyarakat Adat Sentani Papua”**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta,     Maret 2016

**Yang membuat pernyataan,**

**PUTRI PARAMITA**

## **MOTTO**

**Tugas kita bukanlah untuk berhasil, Tugas kita adalah untuk mencoba,  
Karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar  
membangun kesempatan untuk berhasil**

**-Mario Teguh-**

**Kegagalan dan keberhasilan bukanlah takdir namun sebuah pilihan,  
maka kita tidak boleh berhenti berdoa, bekerja dan berusaha untuk  
mencapainya.**

**Tesis ini kupersembahkan untuk:**

- Kedua orang tuaku, Ibunda Helia Aktina dan ayahanda Sumarto
- Kedua kakakku, Marindra Bawono dan Natalia Maharani
- Motivatorku Andriyan Sukma Anggara
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implementasi Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Masyarakat Adat Sentani Papua”** dengan tepat pada waktunya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tesis ini membahas tentang Hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan Perlindungan terhadap anak luar kawin, kedudukan dan hak anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di dalam Hukum Positif dan Hukum Adat Masyarakat Sentani, dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Masyarakat Adat Sentani Papua.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun materiil serta doa dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Supanto S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. Bapak Burhanuddin Harahap, SH., MH., MSI., Ph.D., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta
5. Bapak Dr. Mohammad Jamin, SH., M.Hum selaku Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret Surakarta dan juga Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan lancar;

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Staff Sekretariat Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta ,yang telah banyak membantu kelancaran administrasi, memberikan pelayanan, dan fasilitas selama masa perkuliahan;
8. Orang tua Penulis, Ibunda Helia Aktina, SH. M.Hum dan Ayahanda Johanes Sumarto yang selalu mendoakan, memotivasi dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penulis;
9. Saudara kandung Penulis, Marindra Bawono dan Natalia Maharani, SH. M.Hum yang juga selalu memotivasi penulis agar segera menyelesaikan studi penulis;
10. Andriyan Anggara, S.Hut, M.Si, yang selalu memotivasi penulis, mendukung serta memberi semangat Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini;
11. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura dan dosen Hukum Adat, Hukum Perkawinan dan Hukum Waris Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah meluangkan waktu menjadi narasumber dalam wawancara Penulis;
12. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang menjadi Narasumber dalam Penelitian Penulis, Bapak Dr. Kadir Katjong, SH., MA, Ibu Dahliana Ketaren, SH., M.H, Ibu Sara Ida Magdalena Awi, SH., MH, Bapak Darius Mamoribo, SH., M.Hum, dan semua dosen FH UNCEN yang telah memberikan penulis motivasi dan semangat agar segera menyelesaikan penulisan tesis ini dan segera kembali ke Jayapura tercinta;
13. Kakak Jimmy Wally SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan adik “khaifa” nya Steven Wally , keduanya adalah Masyarakat Adat asli Sentani, anak Ondofolo desa Nendali, Netar yang bersedia memberikan data dan kasus mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan adat Ondoafi yang dialami sendiri oleh Narasumber;
14. Markus Ansaka, SH., MH selaku Ondoafi suku Kheleblouw sebagai Narasumber penulis dalam penyelesaian tesis ini;

15. Helien Somalay, SH, M.Kn selaku Notaris di Kota Jayapura yang meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis dan sebagai Narasumber dalam tesis ini;
16. Bapak Yulles Ongge, SH.,MH dewan adat dalam masyarakat adat Sentani yang juga menjadi Narasumber dalam penulisan tesis ini;
17. Kakak Ritta Yoafifi, SH, M.Kn selaku kakak kelas Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan masyarakat asli suku Ormu Jayapura yang membantu penulis dalam mengarahkan materi, memberikan masukan, dan atas kesediaannya melakukan diskusi materi tesis penulis;
18. Sahabat yang selalu saling mendukung dalam menyelesaikan tesis bersama-sama, dan selalu ada di saat suka dan duka dalam masa perkuliahan dan proses penulisan tesis Penulis, Atika, Ayu Ratnawati, Intania Z. F, Siti Fatimah, dan Andhika Desi Fluita, terimakasih atas kebersamaannya;
19. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 4 yang selalu mendukung Penulis dan banyak membantu penulis memberi masukan dan ilmu dalam menyelesaikan tesis ini Bu Sri Purwanti, Bu Inche Sayuna, Bu Penny Yuli Astuti, Mbak Dewi, dan semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih juga atas kebersamaannya;

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan morilnya, semoga amal kebaikan dari para pihak yang dapat penulis sebutkan diatas maupun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, akan selalu dilimpahkan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum.

Surakarta,     Maret 2016

Penulis,

Putri Paramita



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan tentang Perkawinan.....	12
1. Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia...	12
a. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.....	12
b. Asas-asas Perkawinan.....	13

c. Syarat-syarat Perkawinan.....	13
d. Sahnya Perkawinan.....	15
e. Nikah Siri.....	18
2. Perkawinan Menurut Hukum Adat di Indonesia.....	22
a. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Adat...	22
b. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat.....	23
c. Macam-macam sistem Perkawinan Adat.....	25
B. Tinjauan tentang Anak.....	26
1. Pengertian Anak.....	26
2. Macam-macam Anak.....	26
a. Anak Sah.....	26
b. Anak Zina.....	28
c. Anak Sumbang.....	29
d. Anak Luar Kawin lainnya.....	31
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Anak Luar Kawin..	36
1. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	36
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Anak Luar Kawin.....	39
3. <i>Concurring Opinion</i> .....	44
D. Masyarakat Hukum Adat Sentani Papua.....	51
1. Konsep Masyarakat Hukum Adat.....	51
2. Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Papua.....	53
3. Struktur Sosial Masyarakat Hukum Adat di Papua.	60
4. Masyarakat Hukum Adat Sentani.....	63
5. Hak Ondofolo sebagai Kepala adat.....	66
6. Perkawinan dalam Masyarakat Adat Sentani dan Maskawin sebagai syarat sahnya Perkawinan Adat Sentani Papua.....	67

E. Teori Hukum.....	72
1. Teori Sistem Hukum.....	75
2. Teori Keadilan.....	76
3. Teori Kepastian Hukum.....	78
4. Teori Perlindungan Hukum.....	79
5. Hak Asasi Manusia.....	78
F. Penelitian yang Relevan.....	80
G. Kerangka berpikir.....	83
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>86</b>
A. Jenis Penelitian.....	86
B. Sifat Penelitian.....	87
C. Pendekatan Penelitian.....	87
D. Sumber dan Jenis Data.....	88
E. Teknik Pengumpulan Data.....	88
F. Populasi dan Sampel.....	90
G. Teknik Analisis Data.....	92
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA.....</b>	<b>93</b>
A. Hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Luar Kawin.....	93
1. Pendaftaran Perkawinan Bukan Penentu Keabsahan Perkawinan.....	93
2. Anak yang lahir dari Perkawinan Sah menurut Agama sebagai Anak Luar Kawin bisa dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan.....	100
B. Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	105
1. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Positif.	105

2. Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat di Masyarakat Adat Sentani.....	118
3. Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dikaitkan dengan Teori Keadilan, Kepastian Hukum, Hak Asasi Manusia dan Teori Perlindungan Hukum.....	127
C. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	131
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>143</b>
A. KESIMPULAN.....	143
B. IMPLIKASI.....	146
C. SARAN.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	148

## ABSTRAK

**Putri Paramita, S.351402028, Implementasi Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Masyarakat Adat Sentani Papua.**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin, mengetahui Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam hukum positif dan hukum adat di Masyarakat Adat Sentani Papua, dan mengetahui apakah Putusan tersebut dapat di implementasikan di Masyarakat Adat Sentani Papua.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan Penelitian dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Historis. Sumber data adalah primer yang diperoleh dari wawancara langsung dan Sumber Data sekunder yakni data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin adalah Pencatatan Perkawinan bukan penentu syarat sahnya perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan sah menurut Agama namun tidak dicatatkan, yang lazim disebut nikah siri sebagai anak luar kawin bisa dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan.

Kedudukan anak luar kawin dalam hukum Positif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjadi dibaca “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dalam hukum adat Sentani, kedudukan anak luar kawin dalam hal mewaris dan marga mengikuti ibunya dan keluarga ibunya, namun anak yang dilahirkan dari perkawinan sah secara adat namun tidak didaftarkan ke Pencatatan Sipil, kedudukan anak tersebut adalah anak sah secara adat, dalam hal marga mengikuti ayahnya dan warisan bagiannya ditentukan oleh musyawarah adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam masyarakat Adat Sentani sulit diimplementasikan, karena putusan tersebut hakikatnya melindungi anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan. Seharusnya juga melindungi anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum adat tetapi tidak dicatatkan ke Negara.

**Kata Kunci :Implementasi, Anak Luar Kawin, Masyarakat Adat Sentani Papua.**

## **ABSTRACT**

**Putri Paramita, S.351402028, Implementation of Status and Rights of the Child Born Out of Wedlock Post Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 in Sentani, Papua Indigenous Peoples.**

This research aims to know the essence of the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 in providing protection against child born outside, to knowing that Status and Rights of the Child Born Out of Wedlock in positive law and customary law Indigenous Peoples of Sentani, Papua, and determine whether the verdict can be implemented in Indigenous Peoples of Sentani Papua.

This research is normative juridical and sociological juridical by nature of descriptive analytical research. This research approach by statue approach and historical approach. Sources of data are the primary obtained from interviews and secondary of data namely the primary legal materials, secondary and tertiary. Data collection is carried out through literature study and interviews, and analysis of qualitative data.

The results of this study showed that the essence of Constitutional Court decisions in providing protection against child born outside of wedlock is not the determining condition of Marriage Registration validity , a child born of a legal marriage according to the religion as a child born outside of wedlock can be proved by Science.

Status of child born outside of wedlock in Positive law post Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 this article 43 paragraph 1 law marriage be read Child Born Out of Wedlock has a relationship of civil with the mother and the mother's family as well as with the man as its father, can be proved by science and technology and / or other evidence under the law have blood relations, including civil relations with his father's family. In customary law of Sentani, a child position born outside outside of wedlock in terms of heir and clan follows his mother and his mother's family. However, children born of a legal marriage by custom but not registered with the Civil Registry, the position of the child is the legitimate child by custom, in terms of clan then it should follow his father and the legacy of its parts is determined by customary deliberation.

Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 on indigenous peoples of Sentani is difficult to be implemented, because the decision is essentially to protect children born of legitimate marriage according to the religion, but not recorded, also it is supposed to protect the child born of a valid marriage under customary law but not registered to the State.

**Key words :Implementation, Child Born Out of Wedlock, Indigenous Peoples of Sentani**

